



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER I 2025

**Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum
Jawa Tengah**



Jl. Raya Mr. Moch Ichsan No.114
Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50188

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah selama periode Semester I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah periode Semester I Tahun 2025 dapat menjadi pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.



Semarang, 5 Juli 2025

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rinto Gunawan Sitorus

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2025 telah disepakati Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dengan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang memuat 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu **Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah** dan **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah**. Kedua sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 indikator kinerja yang seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci, capaian Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	3,6 (indeks)	3,81 (indeks)	105,83%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)	3,99	110,83%

Dari sisi anggaran, pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 24.015.339.000 dan mengalami penyesuaian menjadi Rp 25.358.575.000. Dalam pelaksanaannya Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4.009.487.193 atau 15,81%.

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	1.952.506.000	1.102.483.830	56,47%
Belanja Barang	18.617.069.000	2.731.958.363	14,67%
Belanja Modal	4.789.000.000	175.045.000	3,65%
Total	25.358.575.000	4.009.487.193	15,81%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Sumber Daya Manusia	8
D. Maksud dan Tujuan	10
E. Aspek Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah	11
F. Isu Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah	12
G. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis (Renstra).....	16
B. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP	45
A. Simpulan	46
B. Saran.....	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah ASN di Wilayah Kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah.....	4
Tabel 2. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024	18
Tabel 3. Perjanjian Kinerja.....	20
Tabel 4. Perubahan Perjanjian Kinerja.....	21
Tabel 5. Realisasi Perjanjian Kinerja.....	23
Tabel 6. Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan	25
Tabel 7. Realisasi Anggaran	43
Tabel 8. Capaian Rincian Output	43
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Wilayah Kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi	7
Gambar 3. Skema Penjejang Kinerja	18
Gambar 4. Pohon Kinerja Badiklat Hukum Jawa Tengah.....	19
Gambar 5. SMART DJA.....	37
Gambar 6. IKPA.....	38
Gambar 7. E-Performance	39
Gambar 8. E-Monev Bappenas.....	40
Gambar 9. Survei Kepuasan Masyarakat.....	40
Gambar 10. Sarana dan Prasarana Berbasis HAM.....	41



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dibentuk pada tanggal 30 Mei 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

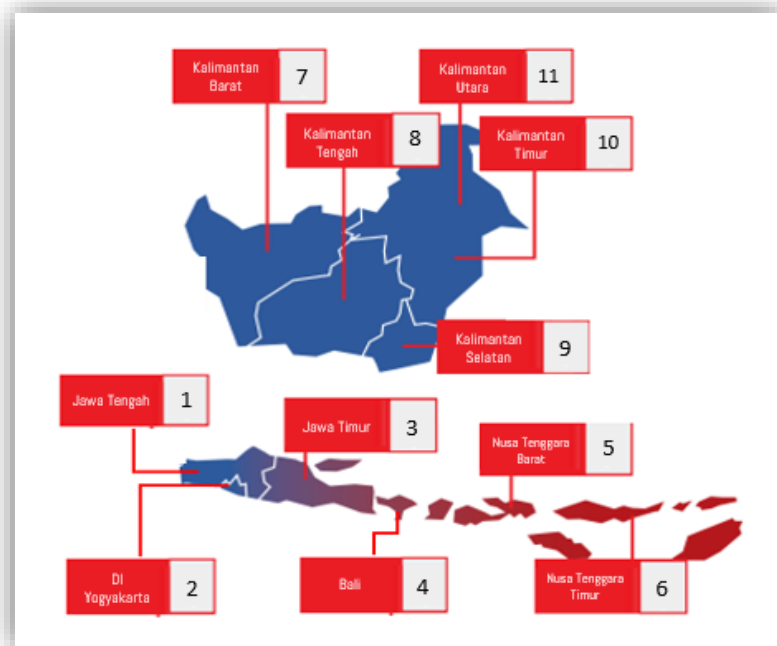
Sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi.

Dalam pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo-Gibran dilakukan restrukturisasi kementerian pada Kabinet Merah Putih untuk memfokuskan fungsi, tugas dan penajaman program-program kementerian sesuai visi pemerintahan saat ini. Kementerian Hukum dan HAM mengalami restrukturisasi menjadi 4 kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang ketiganya berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan. Restrukturisasi ini turut menjadikan perubahan nomenklatur di jajaran Kementerian Hukum, termasuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sampai dengan saat ini, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah masih berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah, yakni provinsi Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

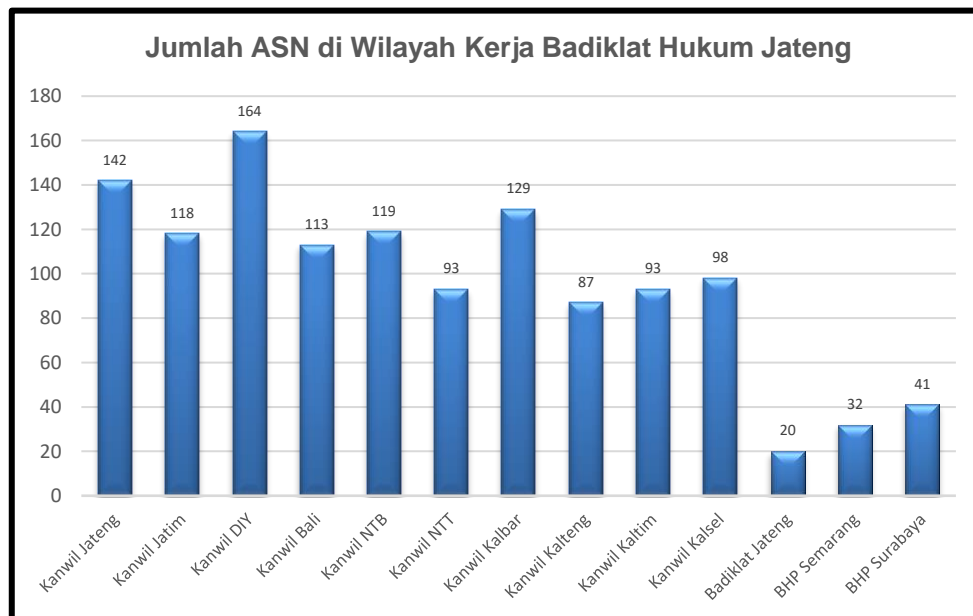
Gambar 1. Sebaran Wilayah Kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah



Dari sebaran wilayah kerja tersebut terdapat 13 (tiga belas) satuan kerja di wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dengan jumlah SDM Aparatur sebanyak 1.249 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah ASN di Wilayah Kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah

No	Satuan Kerja	Jumlah ASN
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah	142
2	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	118
3	Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I.Yogyakarta	164
4	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali	113
5	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	119
6	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur	93
7	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat	129
8	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah	87
9	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur	93
10	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan	98
11	Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	20
12	Balai Harta Peninggalan Semarang	32
13	Balai Harta Peninggalan Surabaya	41
Total		1.249

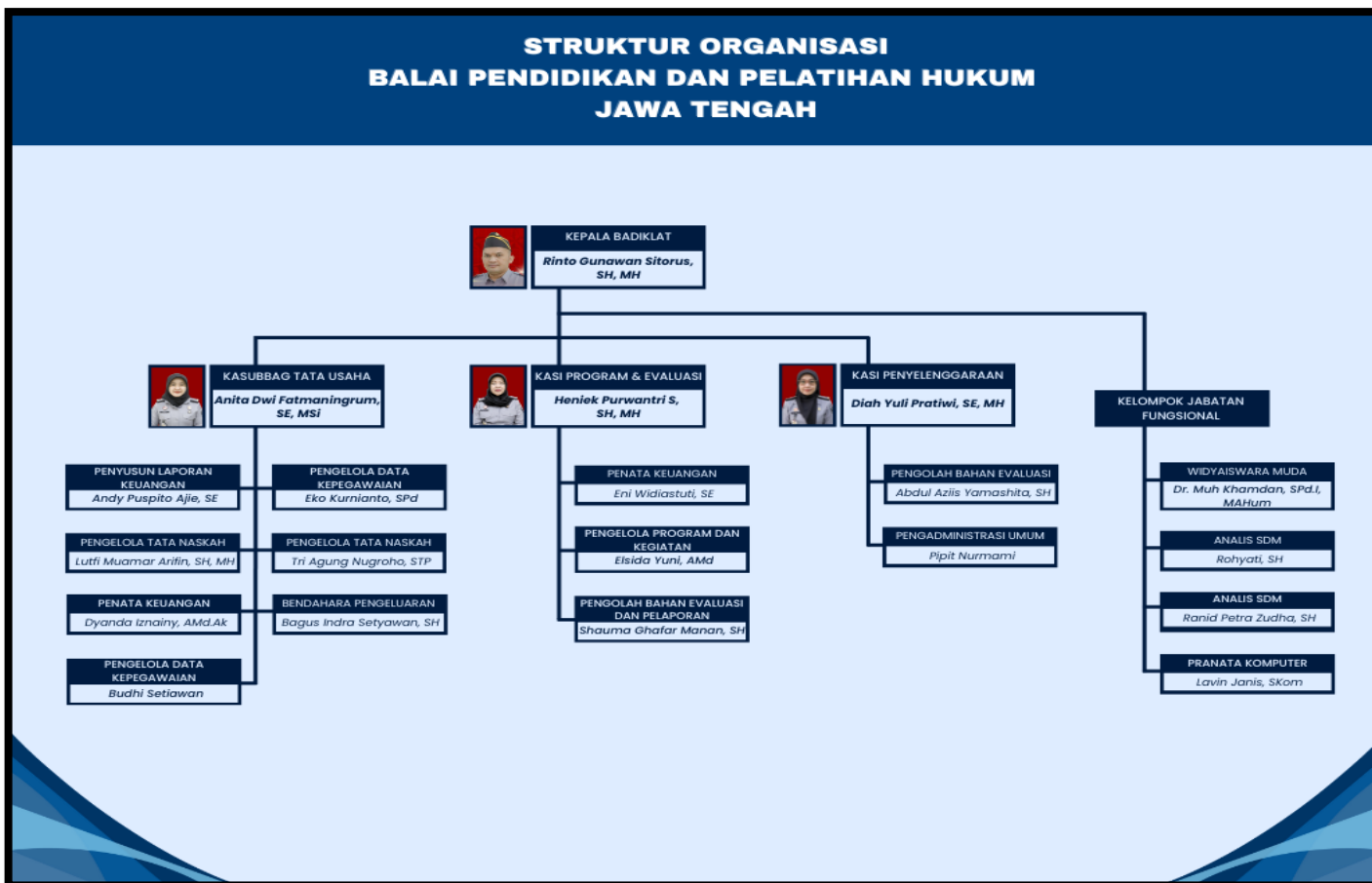


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

Gambar 2. Struktur Organisasi



C. Sumber Daya Manusia



Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Balai Diklat yang dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas dan didukung oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1 orang
Eselon IV	3 orang
JFT	4 orang
JFU	12 orang
Total	20 orang

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 20 ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan yang mendukung kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata

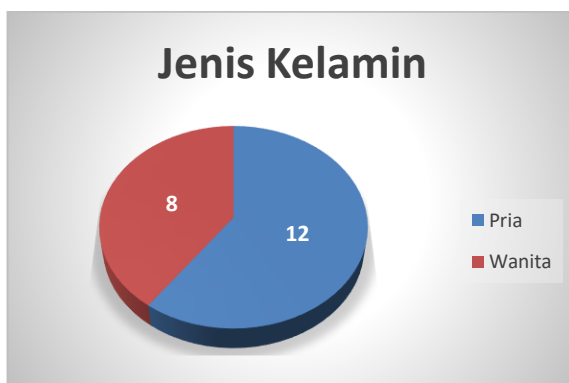
persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Seksi Program dan Evaluasi

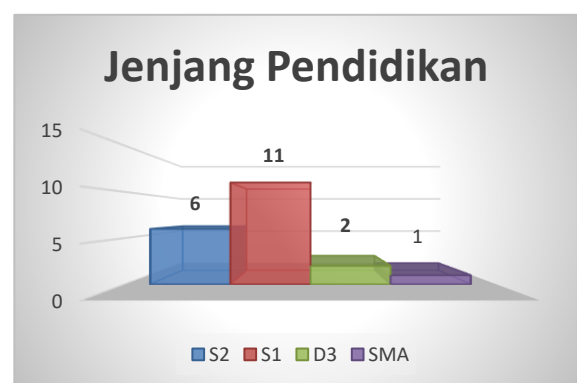
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di wilayah.

3. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

D. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja; Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja; Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Pedoman Evaluasi Kinerja; Pedoman Reviu Laporan Kinerja; Pedoman Reviu LKjIP; Kebijakan penerapan SAKIP, maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.
2. Mendorong Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada *stakeholder* terhadap Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja.
5. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada tahun yang akan datang.

Maksud dan tujuan dari akuntabilitas kinerja ini juga agar visi, misi dan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis. LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaiannya kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

E. Aspek Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

Tugas yang diemban Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kompetensi SDM. Aspek strategis tersebut sejalan dengan menyesuaikan kerangka regulasi dan kelembagaan yang menetapkan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- 2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- 3) Pelaksanaan standarisasi sertifikasi, akreditasi dan sistem pengembangan kompetensi SDM di bidang hukum dalam skema Corporate University;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
- 5) Pelaksanaan administrasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDM Hukum.

F. Isu Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam konteks internal kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sendiri terdapat beberapa isu strategis yang pada akhirnya mendorong teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada sisi sumber daya manusia dan organisasi, belum terpetakannya profil kompetensi yang disandingkan dengan analisis jabatan dan beban kerja telah memicu kendala yang cukup berarti, sehingga mengakibatkan:

- Beban kerja yang belum merata
- Kompetensi pegawai yang belum merata
- Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi

Di samping hal tersebut, terdapat pula beberapa kompetensi yang masih sangat membutuhkan upaya peningkatan lebih lanjut, seperti Teknologi Informasi, Desain Program Pembelajaran (pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran), Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan, serta kebutuhan yang cukup mendesak pula atas peningkatan etos dan budaya kerja profesional. Berbagai hal tersebut pada akhirnya telah memicu pencapaian kinerja organisasi yang belum optimal, serta tidak terlaksananya berbagai program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi dengan metodologi yang mutakhir.

Dalam hal metodologi pembelajaran sendiri, telah dimilikinya program pembelajaran berbasis *e-learning*, serta ketersediaan instrumen evaluasi pembelajaran dan paska pelatihan (meskipun masih membutuhkan upaya

pemutakhiran agar memberikan hasil yang maksimal), telah menjadi suatu kekuatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang mendorong peningkatan jumlah pegawai yang mendapatkan program pengembangan kompetensi, serta dapat terukurnya peningkatan kompetensi peserta pelatihan, dan kualitas penyelenggaraan pelatihan.

Namun demikian, dalam hal metodologi ini pula didapatkan indikasi bahwa masih belum terjadi kesesuaian antara metodologi pembelajaran dengan kebutuhan pegawai Kementerian Hukum serta alokasi anggaran. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada:

1. kualitas program pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum yang belum maksimal,
2. belum meratanya pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum, berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023 dan PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah memiliki inovasi yang digunakan untuk menunjang kinerja diantaranya:

- BLC (*Balai Pendidikan dan Pelatihan Learning Center*) yang merupakan portal pembelajaran mandiri milik Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah;
- JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
- Si AKSI merupakan rencana aksi yang disusun peserta pelatihan sebagai bentuk implementasi hasil pelatihan di satuan kerja sekaligus menjadi dasar penilaian kebermanfaatan pelatihan dan keberlanjutan pasca pelatihan;
- Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah berdasarkan zonasi wilayah yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

G. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKjIP, tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, serta sistematika laporan;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program kerja sesuai perjanjian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2025;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun periode Semester I Tahun 2025 mencakup :

- a. Capaian Kinerja Organisasi, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi beserta capaian kinerja anggaran dan capaian lainnya.
- b. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja periode Semester I Tahun 2025 yang dirangkum dalam simpulan dan saran atas akuntabilitas kinerja.

A close-up photograph of a fountain pen and a decorative pen holder. The fountain pen is silver with a dark nib and is lying on a wooden surface. The pen holder is also silver and has a decorative, fleur-de-lis-like design. The background is a dark, textured surface, possibly wood or stone. The text "BAB II PERENCANAAN KINERJA" is overlaid on the image in a bold, black, sans-serif font.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang menguraikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok kementerian. Dokumen ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum, Kementerian Hukum saat ini masih berpedoman pada Renstra Tahun 2020-2024 karena Renstra Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan finalisasi.

Kementerian Hukum mempunyai **visi** yaitu :

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Penegakan dan kesadaran hukum serta penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
2. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Guna melaksanakan misi yang telah ditetapkan, maka **tujuan** yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum antara lain :

1. Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia;
2. Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan hasil formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi. Setiap perubahan lingkungan strategis akan mempengaruhi upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada Tahun 2022, terdapat perubahan lingkungan strategis meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terbitnya undang-undang ini mempengaruhi penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Selain itu, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan *logic model* yang diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel berikut.

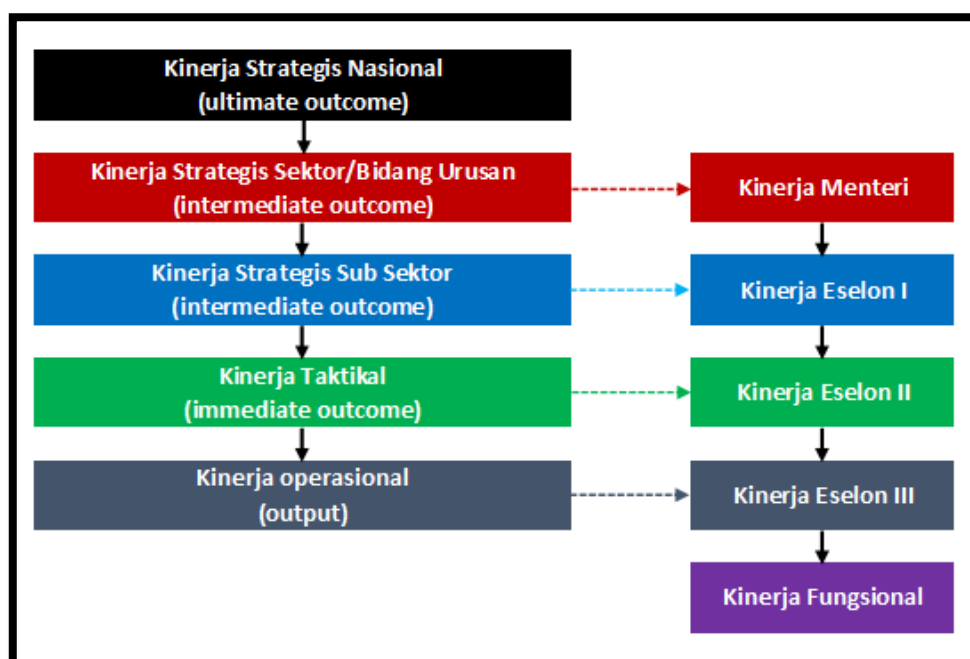
Tabel 2. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024

(Sumber: Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024)

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Mendukung Sasaran Pembangunan Nasional
SS.1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	IKSS 1.1 Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap
SS.2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	IKSS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

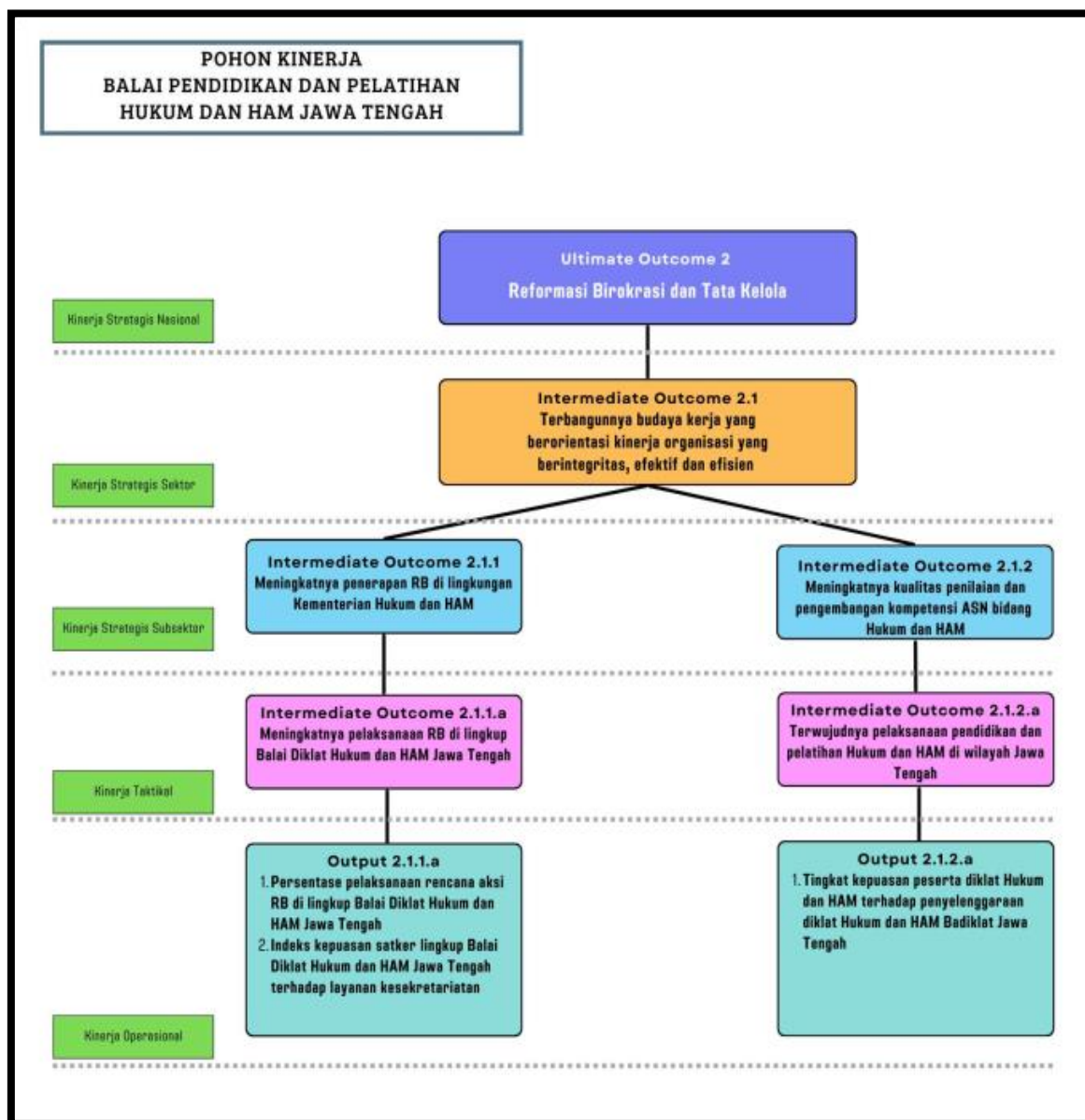
Menteri Hukum dan HAM memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS dan IKSS ini menjadi tujuan utama seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan dalam pohon kinerja melalui penjenjangan kinerja dengan skema sebagai berikut.

Gambar 3. Skema Penjenjangan Kinerja



Berdasarkan SS dan IKSS Menteri Hukum dan HAM yang diturunkan secara berjenjang kepada Unit Eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis, maka penjabaran pohon kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang merupakan turunan dari pohon kinerja BPSDM Hukum sebagai berikut.

Gambar 4. Pohon Kinerja Badiklat Hukum Jawa Tengah



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah adalah dokumen berisikan penugasan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Berikut Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 (dokumen legal terlampir).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	3,6 (indeks)
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)

No	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah		Rp 24.015.339.000
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 4.807.539.000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp 4.789.000.000
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp 13.624.164.000
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 794.636.000

Seiring dengan penyesuaian anggaran dikarenakan penambahan anggaran belanja untuk pelaksanaan Latsar CPNS dan belanja pegawai serta kebijakan efisiensi anggaran, maka turut dilakukan penyesuaian anggaran pada Perjanjian Kinerja tertanggal 19 Juni 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. Perubahan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	3,6 (indeks)
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)

No	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah		Rp 25.358.575.000
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 5.974.506.000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp 4.789.000.000
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp 13.744.885.000
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 850.184.000



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan kinerja sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan target dan realisasi sebagaimana yang ditelaah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 5. Realisasi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	3,6 (indeks)	3,81 (indeks)	105,83%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)	3,99	110,83%

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah

1. Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Hukum terhadap Penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	3,6	3,81	105,83%

Tingkat kepuasan peserta diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator, yakni Evaluasi Tenaga Pengajar, Evaluasi Modul Pelatihan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan dengan formulasi sebagai berikut.

Dimensi	Indikator	Bobot (W)
A	Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar	30%
B	Persentase Evaluasi Modul Pelatihan	30%
C	Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan	40%

$$\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$$

Keterangan:

A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar

B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan

C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Sesuai formula yang ditetapkan, maka dapat diukur capaian tingkat kepuasan peserta diklat dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat kepuasan peserta} &= \{(0,9556 \times 30\%) + (0,9469 \times 30\%) + (0,9524 \times 40\%)\} \times 4 \\ &= \mathbf{3,81} \text{ (indeks)} \end{aligned}$$

Tabel 6. Capaian Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan

Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Metode	Capaian Output	Evaluasi		
				Pengajar	Materi	Penyelenggaraan
MOOC Pelayanan Publik	8 – 17 April 2025	MOOC	145	-	-	-
Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	21 – 26 April 2025	Klasikal	40	94,60	92,96	94,83
Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	14 – 20 Mei 2025	PJJ	30	96,59	96,30	96,49
Webinar Series "Membangun Budaya Kerja Kolaboratif Melalui Komunikasi di Era Digital"	21 Mei 2025	PJJ	965	-	-	-
Pelatihan <i>Impactful Communication</i>	17 – 20 Juni 2025	PJJ	40	95,48	94,80	94,41
Rata-rata				95,56	94,69	95,24
				0,9556	0,9469	0,9524
Tingkat Kepuasan Peserta Diklat (indeks)				3,81		

Dari capaian di atas, jika dibandingkan dengan target sebesar 3,6 maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah **mencapai target** dalam menyelenggarakan Diklat Hukum yang berkualitas bagi ASN Kementerian Hukum.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian	Target	Realisasi Semester I	Capaian
Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	3,6	3,80	105,56%	3,6	3,81	105,83%

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan realisasi dan capaian tingkat kepuasan peserta diklat pada Semester I 2025 dibandingkan Semester I 2024. Dengan target yang sama, realisasi Semester I Tahun 2024 sebesar sebesar 3,80 dengan capaian 105,56% dan realisasi Semester I Tahun 2025 sebesar 3,81 dengan capaian 105,83%. Hal ini menunjukkan kualitas penyelenggaraan diklat Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah semakin meningkat dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	85%	93%	90%	95%	92%	93,65%	3,6	3,80	3,6	3,81

Dari tabel di atas diketahui bahwa target jangka menengah pada indikator ini selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai dengan 2023. Namun dikarenakan perubahan Renstra Kemenkumham sesuai Permenkumham No.7 Tahun 2024 maka target tahun 2024 juga berubah menjadi indeks. Apabila dilakukan perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra, Balai

Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah secara umum telah mencapai target yang ditetapkan.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dipengaruhi oleh :

- Pelatihan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja mereka;
- Dalam mendukung Kementerian Hukum Corporate University Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan berbasis online seperti webinar yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan pencapaian output peserta jauh melebihi target yang telah ditetapkan;
- Para Widyaiswara yang dihadirkan baik secara klasikal maupun daring merupakan pegajar yang kompeten dan ahli di bidangnya;
- Para panitia penyelenggara juga aktif dalam memberikan informasi dan pendampingan selama pelatihan berlangsung;
- Hasil pelatihan yang diterima oleh para peserta sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dirasakan oleh para pejabat pengawas yang di satuan kerja peserta yang juga menjadi responden evaluasi.

Di samping itu juga terdapat kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah memetakan kendala tersebut beserta mitigasi risikonya seperti pada tabel berikut.

No	Kendala / Permasalahan	Mitigasi Risiko
1	Widyaiswara yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar secara mandiri masih sangat kurang.	Membuat usulan terkait penambahan JF Widyaiswara dan mengoptimalkan peran pejabat struktural di lingkup Badiklat Jawa Tengah sebagai tenaga pengajar/penguji
2	Perubahan Jadwal Diklat yang menyesuaikan tenaga pengajar terutama apabila pengajar berasal dari pejabat Administrasi dan Pimti di luar Badiklat Jawa Tengah	Melakukan koordinasi terkait ketersediaan waktu pimpinan pada hari pelaksanaan kegiatan waktu respon atas kepastian ketersediaan pimpinan
3	Website e-learning mengalami kendala dari server saat pelaksanaan pelatihan PJJ	Melakukan koordinasi berkala dengan Pusdatin terkait proses pemulihan server saat terjadi kendala
4	Peserta pelatihan dengan metode PJJ tidak dibebastugaskan dari tugas kedinasan.	Melakukan komunikasi dengan atasan langsung peserta terkait kehadiran dan keaktifan peserta selama mengikuti pelatihan
5	Peserta yang mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan tupoksinya	Memberikan catatan tambahan pada surat pemanggilan peserta pelatihan ke Kantor Wilayah
6	Hasil atau output pelatihan kurang maksimal.	Mewajibkan kepada seluruh peserta pelatihan teknis untuk menyusun Action Plan (Si AKSI) sebagai salah satu bentuk inovasi agar pelatihan yang diselenggarakan lebih berdampak
7	Bahan atau modul diklat pada BPSDM Hukum belum ter-update.	Melakukan pengusulan kebutuhan belanja modal pada saat analisa kebutuhan pagu anggaran tahun yang akan datang
8	Rencana program pelatihan kurang mendasar kebutuhan yang ada pada wilayah kerja Badiklat Jawa Tengah	Melaksanakan Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) berdasarkan zonasi wilayah yang telah ditetapkan oleh Kepala Badiklat Jateng
9	Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pelatihan klasikal	Menyusun perencanaan anggaran pelatihan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi
10	Keterbatasan pelaksanaan pelatihan Klasikal	Menciptakan inovasi pengendalian berupa Aplikasi BLC (Badiklat Learning Center) yang merupakan sarana pembelajaran <i>self development</i> bagi pegawai Kementerian Hukum

Sumber : Dokumen Manajemen Risiko Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.

g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Kegiatan penunjang keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Semester I	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%	100%	100%

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh indikator rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Semester I Tahun 2025 yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\text{rencana aksi RB yang terlaksana}}{\text{total rencana aksi RB}} \times 100\%$$

$$= \frac{77}{77} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian	Target	Realisasi Semester I	Capaian
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dan capaian indikator ini telah tercapai 100%, baik pada Semester I 2024 maupun Semester I 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah mampu melaksanakan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan baik.

c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada Tahun 2024 tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai Permenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada target jangka menengah Renstra.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam merealisasikan target kinerja Tahun 2024 karena adanya dukungan dari Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Unit Eselon I dalam menyelenggarakan rencana aksi reformasi birokrasi.

Di samping itu juga terdapat kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah memetakan kendala tersebut beserta mitigasi risikonya seperti pada tabel berikut.

No	Kendala / Permasalahan	Mitigasi Risiko
1	Pemenuhan dokumen rencana aksi tidak tepat waktu	Melakukan monitoring terkait pemenuhan data dukung rencana aksi
2	Data dukung rencana aksi yang disajikan masih kurang memadai	Melakukan sosialisasi internal terkait data dukung rencana aksi

Sumber : Dokumen Manajemen Risiko Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.

g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Kegiatan penunjang keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I.

2. Indeks Kepuasan Satuan Kerja Lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap Layanan Kesekretariatan

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Semester I	Capaian (%)
Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,99	110,83%

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan melalui survey yang diisi oleh para pegawai dengan parameter sebagai berikut:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
2. Kejelasan informasi layanan (L2)
3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
9. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
10. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Semester I Tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum, realisasi ILK Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sebesar 3,99 dengan predikat Sangat Baik (A) dan capaian atas realisasi tersebut sebesar 110,83%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi Semester I	Capaian	Target	Realisasi Semester I	Capaian
Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1	NA	NA	3,1	3,99	110,83%

Pada Semester I Tahun 2024 belum terdapat instrument/indikator penilaian dari Unit Eselon I sehingga realisasinya belum dapat diukur sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Semester I Tahun 2025.

c) Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	3,1	NA	3,1	3,99

Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan pada Tahun 2024 tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai Permenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

d) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam merealisasikan target kinerja karena adanya dukungan dari seluruh unsur Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah dalam menyediakan layanan kesekretariatan.

Di samping itu beberapa kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja ini serta mitigasi risikonya seperti pada tabel berikut.

No	Kendala / Permasalahan	Mitigasi Risiko
1	Terlambatnya pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian kepegawaian di Kantor Wilayah terkait ketentuan pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala
2	Terlambatnya pengusulan dokumen kepegawaian terkait seleksi administrasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Mengeluarkan nota dinas terkait pengumuman seleksi administrasi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
3	Pemeliharaan Aset Negara yang tidak terjadwal, sehingga menyebabkan Aset Negara tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja saat dibutuhkan	Melakukan pengusulan kebutuhan belanja barang pada saat analisa kebutuhan pagu anggaran tahun yang akan datang
4	Hubungan Kerja Sama dengan Instansi lain dan Organisasi Kemasyarakatan tidak berjalan baik/tidak berlanjut	Memberikan pengarahan dari Pimpinan kepada seluruh jajaran terkait sikap profesional dan kontrol ego kepada seluruh jajaran

Sumber : Dokumen Manajemen Risiko Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang terbatas Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah mampu mencapai target kinerja.

g) Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Kegiatan penunjang keberhasilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Kantor Wilayah dan Unit Eselon I.

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Berikut capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada aplikasi SMART DJA.

Gambar 5. SMART DJA



Nilai kinerja anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada aplikasi SMART DJA sebesar 52,01 yang merupakan komposisi dari nilai perencanaan anggaran dan nilai pelaksanaan anggaran. Adapun perbandingan kedua nilai tersebut sebagai berikut :

- Nilai perencanaan anggaran sebesar 4,01 (bobot 2,01)
- Nilai pelaksanaan anggaran sebesar 100 (bobot 50)

2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil anggaran dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah memperoleh nilai IKPA Semester I Tahun 2025 sebesar **100** dengan komponen sebagai berikut:

Gambar 6. IKPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : JUNI																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	026	135	693164	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

- Revisi DIPA dengan nilai 100
- Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 100
- Penyerapan Anggaran dengan nilai 100
- Belanja Kontraktual dengan nilai 100
- Penyelesaian Tagihan dengan nilai 100
- Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 100
- Capaian output dengan nilai 100

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-Performance Kementerian Hukum

E-performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Dari ketiga indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator tercapai 100% dan 2 (dua) indikator melebihi target. Hal ini menunjukkan kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sudah sangat baik dalam merealisasikan sasaran kegiatan yang ditetapkan.

Gambar 7. E-Performance

Capaian Kinerja BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH					
Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%	Satuan
Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum	3.6	3.81	105.83	nilai
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum	100	100	100	%
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum	Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum terhadap layanan kesekretariatan	3.1	3.99	128.71	nilai

n/a Tidak Ada Target
 < 100 Tidak Tercapai
 = 100 Tercapai
 > 100 Melebihi Target

2) E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev Bappenas juga digunakan untuk pemantauan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah melakukan pelaporan kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas dengan persentase

kelengkapan pelaporan Semester I Tahun 2025 sebesar **100%** sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

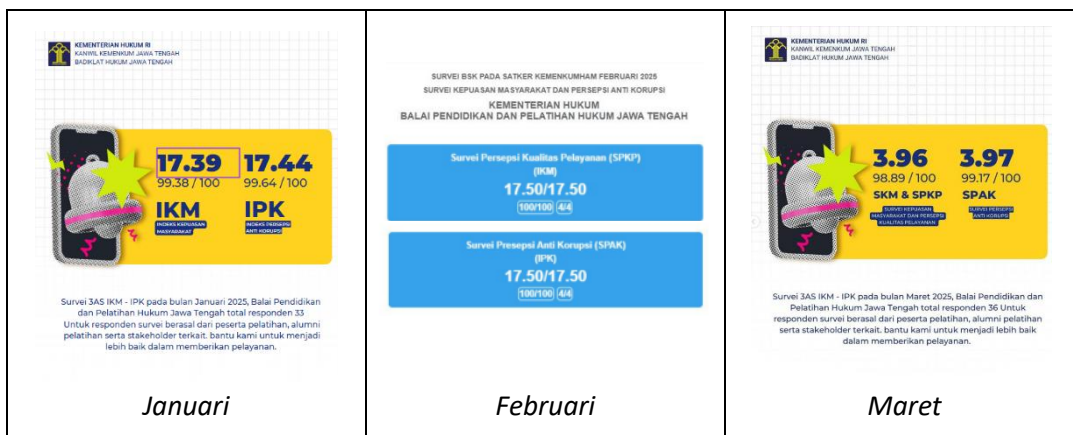
Gambar 8. E-Monev Bappenas



3) Survey Kepuasan Masyarakat

Akselerasi pemerataan akses pengembangan kompetensi yang dilakukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa berdampak pada peningkatan persepsi layanan yang semakin baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan tiap bulan yang menjadi dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK).

Gambar 9. Survei Kepuasan Masyarakat

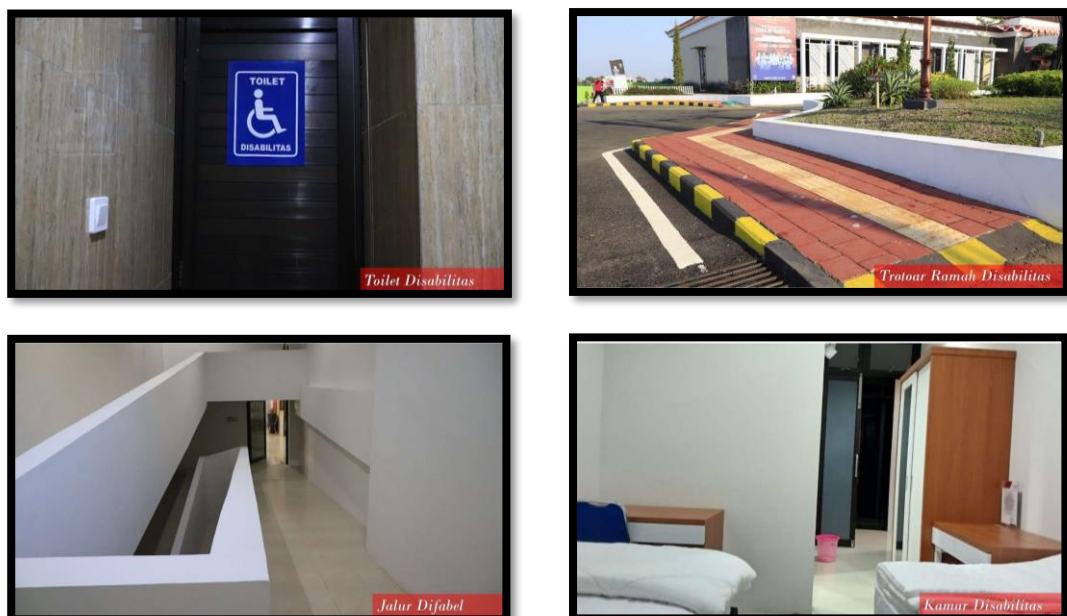




4) Pelayanan Publik Berbasis HAM

Dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah turut serta dalam penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dengan melengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas yang berbasis HAM di antaranya :

Gambar 10. Sarana dan Prasarana Berbasis HAM



5) Kerjasama, Sinergi dan Kolaborasi

Kerjasama, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan kerja. Sinergi dapat di maknai sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan melalui kolaborasi masing-masing pihak yang tentunya memberikan manfaat baik untuk organisasi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal pengembangan kompetensi dengan para Lemdik Kementerian/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten lainnya. Pada Semester I Tahun 2025, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan kerjasama dan sinergi dengan Pusdiklat Pengawasan BPKP dalam menyelenggarakan Pelatihan SPIP Terintegrasi dan Pelatihan Manajemen Risiko.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	1.952.506.000	1.102.483.830	56,47%
Belanja Barang	18.617.069.000	2.731.958.363	14,67%
Belanja Modal	4.789.000.000	175.045.000	3,65%
Total	25.358.575.000	4.009.487.193	15,81%

Adapun alokasi anggaran dan realisasi rincian output adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Rincian Output

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.974.506.000	3.061.220.928	51,24%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.789.000.000	175.045.000	3,65%
Layanan Manajemen SDM Internal	13.744.885.000	684.539.330	4,98%
Layanan Manajemen Kinerja Internal	850.184.000	88.681.935	10,43%
Total	25.358.575.000	4.009.487.193	15,81%

Awal Tahun 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sebesar Rp 24.015.339.000 sesuai DIPA Nomor SP DIPA-135.13.2.693164/2025 tanggal 2 Desember 2024. Pada tahun berjalan terdapat perubahan anggaran dikarenakan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 1.343.236.000 sehingga pagu saat ini adalah Rp 25.358.575.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.009.487.193 atau 15,81%.

Sesuai arahan Presiden terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga dan kebijakan penyesuaian belanja negara, maka dilakukan pemblokiran anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sejumlah Rp 16.553.385.000 yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp 11.964.385.000 dan belanja modal sebesar Rp 4.589.000.000. Hal ini mengakibatkan perubahan rencana kegiatan dan

beberapa jenis belanja belum dapat direalisasikan karena dana tidak dapat dicairkan sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran belum maksimal.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan

Berikut perbandingan capaian kinerja keuangan Tahun 2024 dengan Tahun 2025.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan

Jenis Belanja	2024			2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	1.444.670.000	778.776.605	53,91%	1.952.506.000	1.102.483.830	56,47%
Belanja Barang	8.390.707.000	3.562.021.432	42,45%	18.617.069.000	2.731.958.363	14,67%
Belanja Modal	204.150.000	85.150.000	41,71%	4.789.000.000	175.045.000	3,65%
Jumlah	10.039.527.000	4.425.948.037	44,09%	25.358.575.000	4.009.487.193	15,81%

Dari data di atas diketahui bahwa :

- Pagu anggaran Belanja Pegawai tahun 2025 lebih besar dibandingkan tahun 2024 dikarenakan adanya alokasi gaji dan tunjangan PPPK pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.
- Pagu anggaran Belanja Barang tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya Pelatihan Dasar CPNS serta pelatihan lainnya yang dialokasikan dilaksanakan secara klasikal.
- Pagu anggaran Belanja Modal tahun 2025 lebih besar dibandingkan tahun 2024 dikarenakan terdapat pengadaan *golfcar* dan pembangunan *co-working area*, rumah dinas dan masjid.
- Capaian realisasi Semester I Tahun 2025 lebih kecil dibandingkan Semester I Tahun 2024 dikarenakan adanya dana blokir akibat efisiensi anggaran sehingga mengakibatkan perubahan rencana kegiatan dan beberapa jenis belanja belum dapat direalisasikan.

A stack of approximately seven books is placed on a wooden desk. On top of the stack sits a small, white, square-shaped pot containing a green, succulent-like plant. The background is a blurred bookshelf filled with various books, creating a sense of a library or study. The text 'BAB IV' and 'PENUTUP' is overlaid on the image in a bold, black, sans-serif font.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah secara umum dapat merealisasikan seluruh target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati.

Dari ketiga indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, seluruhnya mampu mencapai bahkan melebihi target. Hal ini menunjukkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah berupaya untuk memberikan kinerja terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, anggaran, dan dari sisi sarana prasarana.

Sementara itu, total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebesar Rp 24.015.339.000 dan mengalami penyesuaian menjadi Rp 25.358.575.000. Dalam pelaksanaannya Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4.009.487.193 atau 15,81%. Realisasi ini belum maksimal dikarenakan penyesuaian rencana kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, dapat kami sampaikan saran sebagai berikut :

1. Menjadikan evaluasi capaian kinerja tahun ini sebagai bahan penyusunan strategi mencapai kinerja yang lebih baik;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak lainnya agar capaian kinerja semakin optimal;
3. Percepatan anggaran semakin ditingkatkan sehingga capaian realisasi anggaran dapat maksimal di Tahun 2025.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 (Januari)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gusti Ayu Putu Suwardani
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 17 Januari 2025

<p>Pihak Kedua, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum</p>  <p>Gusti Ayu Putu Suwardani NIP. 195510251990012001</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah</p>  <p>Rinto Gunawan Sitorus NIP. 198208292008011001</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	3,6
2.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

No.	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah		Rp. 24.015.339.000,-
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 4.807.539.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 4.789.000.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 13.624.164.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 794.636.000,-

Depok, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum



Gusti Ayu Putu Suwardani
NIP. 196610261990012001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah



Rinto Gunawan Sitorus
NIP. 196208292008011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus

Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Depok, 17 Januari 2025

Kepala Balai Diklat Hukum
Jawa Tengah



Rinto Gunawan Sitorus
NIP. 198208292008011001

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 (Juni)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gusti Ayu Putu Suwardani
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 19 Juni 2025

<p>Pihak Kedua, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum</p>  <p>Gusti Ayu Putu Suwardani NIP. 196510261990012001</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah</p>  <p>Rinto Gunawan Sitorus NIP. 198208292008011001</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM JAWA TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Wilayah Jawa Tengah	Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum Balai Diklat Jawa Tengah	3,6
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah	100%
		Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Balai Diklat Hukum Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

No.	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah		Rp. 25.358.575.000,-
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 5.974.506.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 4.789.000.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 13.744.865.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 850.184.000,-

Depck, 19 Juni 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum

Gusti Ayu Putu Suwardani
NIP. 196510261990012001

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

Rinto Gunawan Sitrus
NIP. 198208292008011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus

Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Depok, 19 Juni 2025

Kepala Balai Diklat Hukum
Jawa Tengah



Rinto Gunawan Sitorus
NIP. 198208292008011001

Lampiran 3. Manual IKU Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK.5249.3 Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Hukum dan HAM di wilayah Jawa Tengah</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK.5249.3.1 Tingkat kepuasan peserta Diklat Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM Balai Diklat Jawa Tengah</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> Target 2024 3,6 </div>
<p>DEFINISI</p> <ul style="list-style-type: none"> Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan yang diberikan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan. Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (<i>customer satisfaction</i>), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah diukur berdasarkan parameter tenaga pengajar, modul dan penyelenggaraan pelatihan. 	
<p>BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan hasil survei kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Pelatihan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah</p>	<p>SUMBER DATA Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah</p>
<p>FORMULA / CARA MENGHITUNG</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;"> $\text{Tingkat Kepuasan Peserta} = [(W_1 \times A) + (W_2 \times B) + (W_3 \times C)] \times 4$ </div> <p>Keterangan: A: Persentase Evaluasi Tenaga Pengajar B: Persentase Evaluasi Modul Pelatihan C: Persentase Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan</p>	



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\frac{\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah}} \times 100\%}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5249.4 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK.5249.4.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staff/petugas) (L6)
 7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staff/petugas) (L7)
 8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 9. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L9)
 10. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L10)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

Lampiran 4. Realisasi Anggaran per Tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan SAKTI

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;							
Periode Juni 2025							
Kementerian : 135	KEMENTERIAN HUKUM						
Unit Organisasi : 13	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM						
Satuan Kerja : 693164	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH						Hal 1 dari 25
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	8,805,190,000	0	3,518,194,053	491,293,140	4,009,487,193	45.54 %	4,795,702,807
WAProgram Dukungan Manajemen	8,805,190,000	0	3,518,194,053	491,293,140	4,009,487,193	45.54 %	4,795,702,807
WA.7149 Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah	8,805,190,000	0	3,518,194,053	491,293,140	4,009,487,193	45.54 %	4,795,702,807
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,591,472,000	0	2,631,362,746	429,858,182	3,061,220,928	54.75 %	2,530,251,072
EBA.003 Layanan Kerja Sama	10,640,000	0	1,050,000	0	1,050,000	9.87 %	9,590,000
052 Pelaksanaan Kerja Sama	10,640,000	0	1,050,000	0	1,050,000	9.87 %	9,590,000
052.0A Administrasi Kerja Sama	10,640,000	0	1,050,000	0	1,050,000	9.87 %	9,590,000
521211 Belanja Bahan	5,440,000	0	0	0	0	0.00 %	5,440,000
000001. Kudapan Rapat	680,000	0	0	0	0	0.00 %	680,000
000002. Makan Rapat	2,760,000	0	0	0	0	0.00 %	2,760,000
000003. Pengandaan, Penjilidan dan Penyusunan Laporan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000004. ATK	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
000005. Honor Narasumber Eksternal	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,050,000	0	1,050,000	87.50 %	150,000
000006. Transport dalam Kota	1,200,000	0	1,050,000	0	1,050,000	87.50 %	150,000
EBA.956 Layanan BMN	8,640,000	0	0	68,400	68,400	0.79 %	8,571,600
051 Penatausahaan BMN	8,640,000	0	0	68,400	68,400	0.79 %	8,571,600
051.0A Penatausahaan BMN	8,640,000	0	0	68,400	68,400	0.79 %	8,571,600
521211 Belanja Bahan	7,440,000	0	0	68,400	68,400	0.92 %	7,371,600
000007. Kudapan Rapat	680,000	0	0	0	0	0.00 %	680,000
000008. MakanRapat	2,760,000	0	0	0	0	0.00 %	2,760,000
000009. Pengandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,500,000	0	0	68,400	68,400	2.74 %	2,431,600
000010. ATK	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
000011. Transport dalam Kota	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.